

Analisis Pola Komunikasi Organisasi dalam Membentuk Perilaku Organisasi dan Partisipasi Publik pada Pemberdayaan Masyarakat

Analysis of Organizational Communication Patterns in Shaping Organizational Behavior and Public Participation in Community Empowerment

Ulva Roifatul Lailin¹, Putri Cinta Mei²

Universitas Islam Balitar Blitar, Indonesia

E-mail: ¹doramexminorii@gmail.com*, ²pcinta500@gmail.com

Artikel Info	ABSTRAK
Diterima: 6 Mei 2026 Disetujui: 15 Mei 2026 Diterbitkan: 15 Mei 2026 Hal. 74-81	Komunikasi dalam berorganisasi adalah faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara-cara komunikasi organisasi, perilaku organisasi, dan partisipasi publik dalam program pemberdayaan komunitas/masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil studi menunjukkan bahwa pola komunikasi organisasi masih belum optimal, ditandai dengan dominasi komunikasi vertikal yang bersifat satu arah, ketimpangan distribusi informasi, serta minimnya pemanfaatan media komunikasi modern. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya perilaku organisasi yang tidak merata, di mana sebagian anggota aktif sementara lainnya cenderung pasif. Partisipasi publik tergolong cukup baik pada tahap pelaksanaan, namun masih rendah pada tahap perencanaan dan evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku organisasi dan meningkatkan partisipasi publik. Penelitian ini membantu meningkatkan metode komunikasi organisasi partisipatif dalam program pemberdayaan masyarakat.
Kata Kunci: Komunikasi Organisasi; Perilaku Organisasi; Partisipasi Publik.	
Keywords: Organizational Communication, Organizational Behavior, Public Participation	ABSTRACT <i>Communication within an organization is an important factor in determining the success of community empowerment programs. The purpose of this research is to analyze the ways of organizational communication, organizational behavior, and public participation in community empowerment programs. The approach used is a qualitative descriptive approach, with data collection thru observation, documentation, and in-depth interviews. The study results indicate that the organization's communication pattern is still not optimal, characterized by the dominance of one-way vertical communication, unequal distribution of information, and minimal use of modern communication media. These conditions result in the formation of uneven organizational behavior, where some members are active while others tend to be passive. Public participation is quite good during the implementation stage, but still low during the planning and evaluation stages. This research concludes that organizational communication plays a central role in shaping organizational behavior and enhancing public participation. This research helps improve participatory organizational communication methods in community empowerment programs.</i>

PENDAHULUAN

Komunikasi organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi publik, terutama pada organisasi masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat. Dalam organisasi, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun koordinasi, hubungan kerja, dan kesepahaman antaranggota organisasi. Melalui komunikasi yang baik, setiap anggota organisasi dapat memahami tujuan, tugas, dan tanggung jawabnya sehingga program yang dijalankan dapat berlangsung secara efektif dan terarah.

Namun, pada praktiknya komunikasi organisasi dalam organisasi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Informasi sering kali terpusat pada pengurus tertentu sehingga tidak seluruh anggota memperoleh informasi secara merata. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya perbedaan pemahaman dan keterlibatan anggota dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sebagian anggota menunjukkan sikap aktif dan partisipatif, sedangkan sebagian lainnya cenderung pasif karena kurang memahami tujuan maupun mekanisme kegiatan organisasi.

Robbins dan Judge (2023) menjelaskan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran informasi antaranggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi organisasi meliputi komunikasi vertikal, horizontal, dan informal. Komunikasi vertikal terjadi antara pimpinan dan anggota organisasi, komunikasi horizontal berlangsung antaranggota yang memiliki kedudukan setara, sedangkan komunikasi informal berkembang melalui interaksi sehari-hari di luar forum resmi organisasi. Menurut Men (2021), komunikasi internal yang efektif mampu meningkatkan keterlibatan anggota organisasi dan mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Selain sebagai sarana koordinasi, komunikasi organisasi juga berperan dalam membentuk perilaku organisasi. Robbins dan Judge (2023) menyatakan bahwa perilaku organisasi berkaitan dengan sikap, motivasi, persepsi, dan interaksi individu dalam organisasi. Anggota yang memperoleh informasi secara jelas dan terbuka cenderung memiliki tingkat tanggung jawab, disiplin, dan partisipasi yang lebih baik dibandingkan anggota yang kurang mendapatkan akses informasi organisasi. Horák et al. (2022) menjelaskan bahwa kualitas komunikasi internal memiliki pengaruh terhadap dinamika kelompok dan efektivitas organisasi. Komunikasi yang terbuka dapat meningkatkan kerjasama dan komitmen anggota, sedangkan komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan perilaku pasif dan rendahnya keterlibatan anggota organisasi.

Komunikasi organisasi juga berkaitan erat dengan partisipasi publik dalam program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi publik merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dalam administrasi publik, partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang partisipatif dan transparan. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki beberapa tingkatan, mulai dari partisipasi semu hingga keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Chan et al. (2022) menyatakan bahwa partisipasi publik yang efektif dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat legitimasi organisasi maupun pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan juga dipengaruhi oleh pola komunikasi yang diterapkan organisasi. Lee et al. (2022) menjelaskan bahwa komunikasi yang terbuka dan penggunaan media komunikasi yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program publik. Dengan demikian, komunikasi organisasi tidak hanya memengaruhi perilaku anggota organisasi, tetapi juga menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

Hubungan antara komunikasi organisasi, perilaku organisasi, dan partisipasi publik merupakan hubungan yang saling berkaitan. Komunikasi organisasi menjadi dasar dalam membangun interaksi sosial dan penyampaian informasi dalam organisasi. Proses komunikasi tersebut kemudian membentuk perilaku anggota organisasi, baik dalam bentuk motivasi, kedisiplinan, maupun keterlibatan dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya, perilaku organisasi yang terbentuk akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Tubek (2022) menyatakan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi publik, sedangkan Fu et al. (2023) menjelaskan bahwa kemampuan

organisasi dalam mendengarkan aspirasi anggota dan masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan publik dalam kegiatan organisasi.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa penyampaian informasi yang belum merata, keterlibatan anggota yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah pada tahap perencanaan dan evaluasi program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi organisasi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku organisasi dan meningkatkan partisipasi publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola komunikasi organisasi, perilaku organisasi, dan partisipasi publik dalam program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang komunikasi organisasi dan partisipasi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi organisasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan melalui komunikasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan inklusif.

Kerangka ini digunakan untuk memahami fenomena secara menyeluruh, bukan untuk memeriksa korelasi secara statistik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran untuk menjelaskan hubungan antara komunikasi organisasi, perilaku organisasi, dan partisipasi publik dalam program pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun secara deskriptif sebagai berikut:

- Pola komunikasi organisasi dipahami sebagai proses interaksi sosial
- Interaksi tersebut membentuk perilaku organisasi
- Perilaku organisasi memengaruhi partisipasi publik

Kerangka ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, bukan untuk menguji hubungan secara statistik.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
(Sumber Hasil Penelitian, 2026)

Kerangka pemikiran ini berangkat dari asumsi bahwa komunikasi organisasi merupakan proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus, baik melalui komunikasi formal maupun informal, antara pimpinan, anggota, dan pihak eksternal. Pola komunikasi tersebut menjadi dasar dalam pembentukan koordinasi, penyampaian informasi, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Interaksi yang terbentuk melalui komunikasi organisasi selanjutnya memengaruhi perilaku organisasi, yang tercermin dalam sikap, tindakan, serta pola kerja anggota. Perilaku organisasi yang terbentuk kemudian berdampak pada tingkat partisipasi publik. Organisasi yang menunjukkan perilaku terbuka, responsif, dan kolaboratif cenderung mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat, sedangkan perilaku yang tertutup dan kurang partisipatif dapat menghambat partisipasi publik. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa

pola komunikasi organisasi menjadi faktor awal yang memengaruhi perilaku organisasi, yang selanjutnya berdampak pada partisipasi publik dalam program pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu memahami fenomena sosial secara mendalam (Creswell & Creswell, 2018) yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena komunikasi organisasi, perilaku organisasi, dan partisipasi publik dalam program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memahami makna, proses, serta interaksi sosial yang terjadi dalam organisasi secara alami tanpa adanya manipulasi variabel, sehingga peneliti dapat menangkap dinamika komunikasi yang berkembang serta dampaknya terhadap perilaku anggota dan keterlibatan masyarakat. Melalui interaksi langsung dengan informan, penelitian kualitatif memungkinkan pengumpulan data kontekstual, interpretatif, dan komsif.

Studi atau penelitian dilakukan pada organisasi masyarakat, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT) “Putri Rahayu” yang berlokasi di RW.09 Lingkungan Jaten Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KWT tersebut aktif melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, memiliki struktur kepengurusan yang jelas, serta melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan organisasi dan program pemberdayaan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2026. Selama proses penelitian, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas organisasi, pola komunikasi antaranggota, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian juga mempertimbangkan kemudahan akses data dan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Informan dalam studi ditentukan berdasarkan asumsi bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas organisasi. Informan penelitian meliputi ketua organisasi sebagai pengambil keputusan dan pusat komunikasi, pengurus inti sebagai pelaksana kegiatan dan penghubung antaranggota, anggota organisasi sebagai penerima dan pelaksana informasi, serta masyarakat penerima manfaat yang berperan dalam menilai tingkat partisipasi publik dalam program pemberdayaan. Dengan melibatkan berbagai kategori informan, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang beragam dan mencerminkan berbagai perspektif terkait fenomena yang diteliti.

Metode pengumpulan data terdiri dari observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberi peneliti pedoman untuk pertanyaan, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk berbicara tentang pengalaman dan perspektif mereka secara bebas. Observasi kegiatan berupa pengamatan secara langsung interaksi komunikasi dalam kegiatan organisasi, baik dalam forum formal seperti rapat maupun dalam kegiatan informal di lapangan, sehingga peneliti dapat memahami perilaku organisasi secara nyata. sehingga dokumentasi digunakan untuk menyempurnakan data melalui pengumpulan arsip, laporan kegiatan, notulen rapat, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

Model interaktif digunakan untuk analisis data (Miles et al., 2014), yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data direduksi dengan memilah, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Ini memudahkan peneliti untuk memahami pola yang muncul. Untuk membuat hubungan antar fenomena jelas, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Menurut Denzin & Lincoln (2018), teknik triangulasi memastikan keabsahan data.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi data yang telah dievaluasi berulang kali. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan valid. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan menggabungkan teknik dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check atau pengecekan ulang data kepada informan untuk memastikan bahwa informasi yang mereka peroleh sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, seluruh proses penelitian dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, valid, dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Komunikasi Organisasi

Pada organisasi masyarakat, ada tiga bentuk utama komunikasi: vertikal, horizontal, dan informal. Contoh komunikasi vertikal adalah saat pimpinan memberikan informasi kepada anggota tim terutama dalam forum rapat dan kegiatan resmi organisasi. Dalam forum tersebut, pimpinan menyampaikan arahan, pembagian tugas, serta informasi terkait program yang akan dilaksanakan. Namun, komunikasi vertikal yang terjadi cenderung bersifat satu arah.

Anggota lebih banyak menerima informasi dibandingkan memberikan tanggapan atau masukan. Kondisi ini menyebabkan interaksi komunikasi menjadi kurang dinamis, dan tidak semua anggota merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi horizontal terjadi antar anggota organisasi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Anggota saling berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan.

Meskipun komunikasi ini berjalan cukup baik, namun penyebaran informasi antara anggota masih terhambat sehingga informasi tidak merata antar anggota, terutama ketika informasi hanya diterima oleh sebagian anggota tertentu. Selain itu, komunikasi informal juga menjadi bagian penting dalam dinamika organisasi. Percakapan santai di luar forum resmi seringkali menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak tersampaikan dalam rapat. Komunikasi ini membantu mempererat hubungan antaranggota, meskipun tidak selalu bersifat sistematis.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala dalam pola komunikasi organisasi, yaitu pertama, adanya ketimpangan informasi antara pimpinan dan anggota menyebabkan sebagian anggota tidak memahami secara utuh program yang dijalankan. Kedua, kurangnya keterbukaan dalam penyampaian keputusan organisasi membuat anggota merasa kurang dilibatkan. Ketiga, penggunaan media komunikasi modern masih sangat terbatas, sehingga informasi tidak tersampaikan secara cepat dan merata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi masih didominasi oleh komunikasi vertikal yang bersifat satu arah. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi belum bersifat dialogis, yang menurut Kim et al. (2023) merupakan prasyarat penting dalam membangun hubungan organisasi yang partisipatif. Situasi seperti ini dapat diartikan bahwa komunikasi belum berjalan secara efektif sepenuhnya. Robbins dan Judge (2023) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif harus melibatkan umpan balik agar terjadi interaksi yang seimbang antara pengirim dan penerima informasi. Selain itu, keterbatasan komunikasi horizontal menunjukkan bahwa koordinasi antaranggota belum optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa komunikasi horizontal berperan penting dalam menciptakan kerjasama dan efektivitas organisasi.

Kendala dalam pemerataan informasi menunjukkan bahwa komunikasi organisasi belum bersifat inklusif. Larson et al. (2022) menekankan bahwa komunikasi yang inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada anggota untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam organisasi. Minimnya penggunaan media komunikasi modern juga menunjukkan bahwa organisasi belum memanfaatkan teknologi sebagai sarana komunikasi. Padahal, komunikasi digital dapat meningkatkan dan menyebarkan informasi dengan lebih cepat pada keterlibatan anggota. Dengan demikian, menurut temuan penelitian ini metode komunikasi dalam organisasi perlu diperbaiki agar lebih terbuka, merata, dan partisipatif.

2. Perilaku Organisasi

Perilaku organisasi pada penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap dan tindakan di antara anggota. Sebagian anggota menunjukkan perilaku aktif, seperti terlibat dalam kegiatan, hadir dalam rapat, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Anggota yang aktif umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kegiatan organisasi. Mereka cenderung memiliki inisiatif dalam membantu pelaksanaan program dan menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka. Namun, terdapat juga anggota yang menunjukkan perilaku pasif.

Mereka jarang hadir dalam kegiatan, kurang terlibat dalam diskusi, dan tidak aktif dalam pelaksanaan program. Perilaku ini muncul karena kurangnya informasi yang diterima serta rendahnya pemahaman terhadap tujuan organisasi. Selain itu, tingkat disiplin anggota juga belum

merata. Beberapa anggota menunjukkan kedisiplinan yang baik, sementara yang lain kurang konsisten dalam mengikuti kegiatan.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan komitmen di antara anggota organisasi. Kerjasama antaranggota juga menunjukkan variasi. Dalam beberapa kegiatan, anggota dapat bekerja sama dengan baik, namun dalam kondisi tertentu koordinasi masih belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh komunikasi yang belum merata serta kurangnya pemahaman bersama terhadap tujuan kegiatan. Variasi perilaku organisasi yang ditemukan menunjukkan adanya pengaruh komunikasi terhadap sikap dan tindakan anggota. (Robbins & Judge, 2023) menyatakan bahwa perilaku organisasi dipengaruhi oleh interaksi sosial dan komunikasi yang terjadi dalam organisasi.

Anggota yang aktif menunjukkan bahwa mereka memiliki akses informasi yang baik serta pemahaman yang jelas terhadap tujuan organisasi. Sebaliknya, anggota yang pasif menunjukkan adanya keterbatasan dalam komunikasi yang mereka terima. Horák et al. (2022) menyatakan bahwa dinamika kelompok dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi internal. Hal ini terlihat dalam penelitian di mana anggota yang mendapatkan informasi yang cukup cenderung lebih aktif dan kooperatif.

Selain itu, tingkat disiplin dan tanggung jawab yang belum merata menunjukkan bahwa komunikasi belum mampu membentuk perilaku organisasi secara menyeluruh. Welch (2018) menegaskan bahwa komitmen dan kedisiplinan anggota dapat ditingkatkan melalui komunikasi internal yang efektif. Dengan demikian, perilaku organisasi dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa komunikasi adalah faktor penting dalam menentukan keterlibatan dan sikap anggota.

3. Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam program pemberdayaan masyarakat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan organisasi. Masyarakat hadir dalam kegiatan rapat, ikut serta dalam pelaksanaan program, serta memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga dan dukungan. Namun, partisipasi masyarakat belum merata dalam setiap tahapan kegiatan. Partisipasi lebih dominan pada tahap pelaksanaan program, sedangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi masih terbatas.

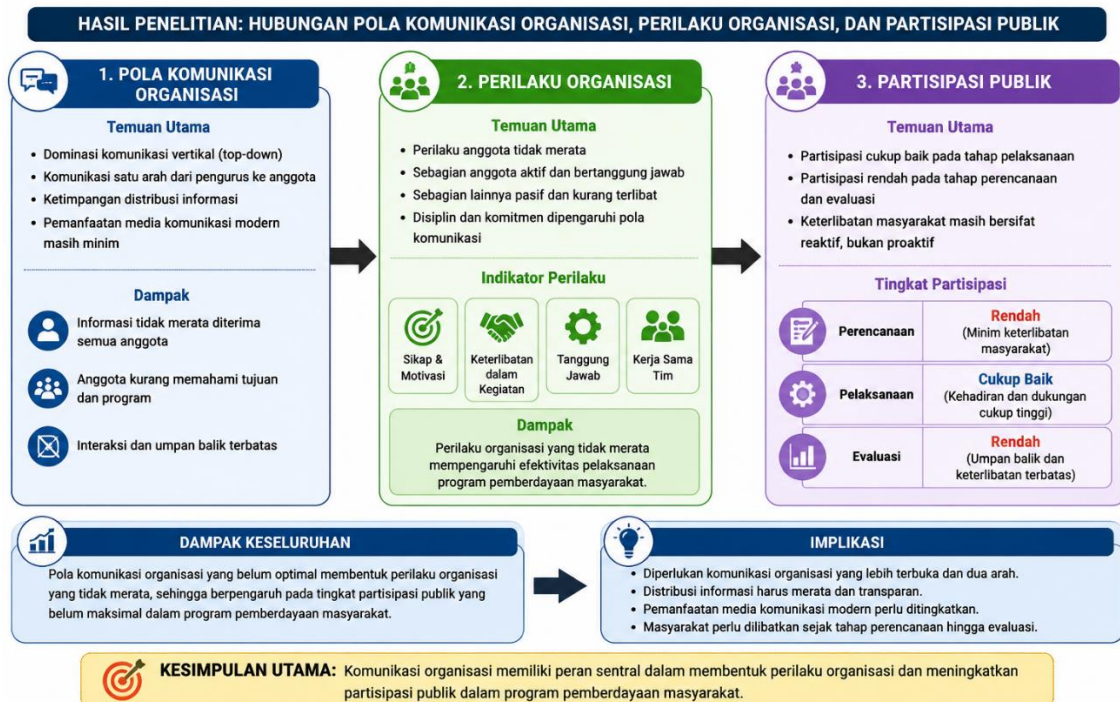
Masyarakat cenderung mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan, namun belum banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap program. Masyarakat yang memahami tujuan program cenderung lebih aktif berpartisipasi, sedangkan yang kurang memahami cenderung pasif. Hambatan dalam partisipasi publik antara lain kurangnya sosialisasi program, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya komunikasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Partisipasi publik yang lebih dominan pada tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam seluruh proses program. Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan, di mana partisipasi yang ideal adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat yang belum optimal. Chan et al. (2022) menyatakan bahwa partisipasi publik yang efektif membutuhkan komunikasi yang transparan dan terbuka. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program juga menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan secara efektif. Lee et al. (2022) menegaskan bahwa komunikasi yang baik, termasuk melalui media digital, dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan partisipasi publik sangat bergantung pada perbaikan komunikasi organisasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara komunikasi organisasi, perilaku organisasi, dan partisipasi publik. Komunikasi yang tidak merata menyebabkan perbedaan perilaku anggota, yang pada akhirnya memengaruhi partisipasi masyarakat. Tubek (2022) menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor utama dalam mendorong partisipasi publik. Selain itu, Fu et al. (2023) menjelaskan bahwa kemampuan organisasi dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan publik. Dengan demikian, komunikasi organisasi menjadi faktor kunci dalam membentuk perilaku organisasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terlihat bahwa komunikasi organisasi memengaruhi perilaku organisasi yang selanjutnya berdampak pada partisipasi publik. Gambar berikut menunjukkan hubungan pola komunikasi, perilaku organisasi dan partisipasi publik tersebut:



Gambar 2.Hubungan Pola Komunikasi Organisasi, Perilaku organisasi, dan Partisipasi Publik (Sumber Hasil Penelitian, 2026)

Gambar tersebut merupakan visualisasi hasil penelitian yang menggambarkan hubungan antara tiga variabel utama, yaitu pola komunikasi organisasi, perilaku organisasi, dan partisipasi publik. Secara ringkas, diagram menunjukkan bahwa:

- 1) Pola komunikasi organisasi yang belum optimal (didominasi komunikasi satu arah, informasi tidak merata, dan minim penggunaan media modern)
- 2) Membentuk perilaku organisasi yang tidak merata, di mana sebagian anggota aktif sementara yang lain pasif
- 3) Bercampak pada partisipasi publik yang belum maksimal, terutama rendah pada tahap perencanaan dan evaluasi

Pada bagian akhir, ditunjukkan bahwa perbaikan komunikasi organisasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan perilaku organisasi dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pola komunikasi organisasi pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Putri Rahayu dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi yang terjalin antar pengurus, anggota, dan masyarakat mampu mendukung koordinasi kegiatan serta membentuk hubungan kerja yang kooperatif dalam organisasi. Hal tersebut terlihat dari adanya keterlibatan anggota dalam kegiatan organisasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan masih terdapat beberapa hambatan dalam proses komunikasi organisasi, namun hambatan tersebut bersifat ringan dan tidak terlalu mengganggu pelaksanaan kegiatan organisasi secara keseluruhan. Hambatan yang ditemukan antara lain belum meratanya penyampaian informasi kepada seluruh anggota, keterbatasan penggunaan media komunikasi digital, serta masih adanya anggota yang pasif dalam

menyampaikan pendapat pada saat kegiatan organisasi berlangsung. Selain itu, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan evaluasi program masih perlu ditingkatkan agar keterlibatan masyarakat dapat berlangsung lebih menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku organisasi dan meningkatkan partisipasi publik. Komunikasi yang berjalan secara terbuka dan terarah mampu mendorong anggota organisasi menjadi lebih aktif, bertanggung jawab, dan kooperatif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, KWT Putri Rahayu disarankan untuk mempertahankan pola komunikasi yang selama ini telah berjalan dengan baik serta meningkatkan komunikasi yang lebih partisipatif dan terbuka antaranggota organisasi. Organisasi juga dapat memanfaatkan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih cepat dan merata. Selain itu, pemberian ruang diskusi dan evaluasi rutin kepada anggota maupun masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan anggota dan memperkuat partisipasi publik dalam setiap tahapan program pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Chan, A. P. C., Ma, T., & Li, Y. (2022). Public participation in infrastructure projects: Trends and implications for governance. *Sustainability*, 14(3), 1456. <https://doi.org/10.3390/su14031456>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506335193>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506335155>
- Fu, W., Wang, Q., & Yang, X. (2023). Organizational listening and public engagement: Evidence from public sector institutions. *Public Relations Review*, 49(2), 102256. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2023.102256>
- Horák, J., Skýpalová, R., & Vávrová, E. (2022). Internal communication and organizational culture in public organizations. *Sustainability*, 14(9), 5302. <https://doi.org/10.3390/su14095302>
- Kim, J. N., Xu, S., & Rim, H. (2023). Dialogic communication and organization–public relationships: A meta-analysis. *Journal of Public Relations Research*, 35(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/1062726X.2022.2077745>
- Larson, G. S., Linabary, J. R., & Long, Z. (2022). Communication inclusion and employee engagement: A systematic review. *Management Communication Quarterly*, 36(4), 567–593. <https://doi.org/10.1177/08933189221085945>
- Lee, Y., Kim, S., & Krishna, A. (2022). Public engagement through digital communication: Evidence from local governments. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101657. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101657>
- Men, L. R. (2021). Engaging employees in China: The impact of communication channels, organizational transparency, and authenticity. *Public Relations Review*, 47(1), 101927. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2020.101927>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781452234887>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson. <https://doi.org/10.4324/9781003270935>
- Tubek, S. (2022). Communication strategies and public participation in local governance. *Public Organization Review*, 22(4), 789–805. <https://doi.org/10.1007/s11115-021-00561-2>
- Welch, M. (2018). Internal communication, employee engagement and identity: A study of public sector organizations. *Public Relations Review*, 44(2), 223–234. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.10.001>